

### **BAB III**

#### **PERAN *SEARCH FOR COMMON GROUND* DALAM MENANGANI KEJAHATAN KEMANUSIAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK- ANAK KORBAN KONFLIK POSO 2009-2016**

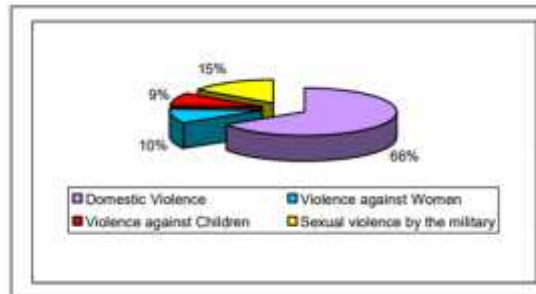
Bab ini membahas tentang peran SFCG dalam menangani kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak-anak korban konflik Poso tahun 2009-2016, dengan terlebih dahulu melihat konsep-konsep yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

##### **3.1. Teori Kejahatan Kemanusiaan menurut Konvensi Jenewa 1949**

Pada subbab ini Penulis akan membahas kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada perempuan dan anak-anak akibat konflik Poso 1998-2001. Untuk kerugian materil yang ditimbulkan akibat konflik sudah Penulis cantumkan pada bab sebelumnya, sedangkan untuk kerugian non-materiil yang harus ditanggung oleh perempuan dan anak-anak jauh lebih kompleks dari mengiklaskan harta benda seperti kehilangan suami atau anak, cacat fisik, kehilangan akses ke pasar, kehilangan akses ke pemanfaatan sumber daya alam, pelecehan dan kekerasan seksual, kerusakan organ reproduksi, pelacuran, penurunan perawatan kesehatan, pengucilan sosial akibat kekerasan seksual dan kehamilan di luar nikah (Women Research Institute, 2005). Sebuah data yang diterbitkan tahun 2004 oleh KPKP-ST menunjukkan

prosentase kekerasan yang diterima perempuan dan anak-anak selama konflik Poso sebagai berikut:

**Grafik 3.1**  
**Prosentase Kekerasan yang Menimpa Perempuan dan Anak-Anak**



Sumber: Women Research Institute, Hal. 16

Konflik Poso yang terjadi selama tahun 1998-2001 membuat posisi mereka sangat rentan mendapatkan pelanggaran HAM seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual, intimidasi, bahkan penganiayaan. Pelecehan seksual secara massal diperoleh perempuan pada kerusuhan Mei 2000 di Desa Sintuwulemba, beberapa saat setelah tragedi Pembantaian Walisongo.

“...kami digiring dan diikat, dikumpulkan di gedung. Semuanya perempuan dewasa tidak sempat mengungsi ke hutan. Kami ditanya oleh penyerang: “ibu-ibu mau diperiksa tidak? Kalau ibu-ibu sayang suami dan anak-anak ya harus mau diperiksa. Biasanya perempuan asal Jawa punya ilmu, jimat di payudara dan alat kelamin.” Kami semua ditelanjangi satu per satu. Saya mau ditelanjangi karena ingat suami, saudara-saudara dan anak-anak supaya mereka selamat. Awalnya saya pikir cuma baju bagian atas tapi ternyata benar-benar ditelanjangi, dipegang payudara dan alat kelamin diperiksa apakah ada sesuatu. Kalau tidak mau mereka membentak dengan mengacungkan pedang di leher...saya cuma ingat suami dan anak-anak. Yang penting mereka selamat, jadi tidak apalah. Yang penting mereka selamat...tapi nyatanya sampai sekarang suami dan semua anak laki-laki saya yang sudah ditangkap tidak pernah kembali lagi...” (Gogali, 2009, p. 48).

Tidak hanya itu, konflik Poso turut mengubah pola pikir perempuan dalam menghadapi lawan jenisnya terutama dalam menghadapi aparat keamanan yang

ditugaskan di daerah konflik. Posisi mereka yang lemah dan tanpa perlindungan membuat perempuan hanya berfokus untuk mencari perlindungan di masa depan. Mereka berfikir bahwa dengan adanya hubungan personal dengan aparat keamanan mampu menjamin keamanannya beserta keluarganya. Namun pemikiran ini juga mendapat pertentangan dari warga sekitar yang terlalu dianggap ‘murahan’ mengingat aparat keamanan sudah tidak mendapat kepercayaan bagi masyarakat Poso.

“...Sekarang semakin banyak perempuan nakal di tempat ini. Mereka mencari perhatian dari TNI dan Polisi yang bertugas di kampung. Hampir setiap malam pergi ke pos-pos penjagaan. Entah apa yang dilakukan disana sampai larut malam. Tiba-tiba sudah hamil. Sudah sering memperingatkan supaya setiap kali ada pergantian petugas TNI atau Polisi baru di desa kami, anak-anak gadis tidak usah gatal *pantat* pergi ke pos-pos lagi. Tapi banyak anak gadis yang tidak peduli, seringkali bahkan orang tua mereka yang mendorong hubungan dengan aparat keamanan. Sungguh memalukan...anda tidak bisa menyalahkan aparat keamanan, salahkan gadisnya, kenapa begitu bodoh menyerahkan diri pada petugas yang jelas-jelas hanya beberapa bulan di desa ini.” (Gogali, 2009) Hal. 57.

Dampak psikis yang lebih menyakitkan bagi hati perempuan adalah istilah-istilah yang diberikan masyarakat di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka dalam mengatasi situasi tersulit pasca konflik. Perempuan korban aparat keamanan disebut sebagai Tapol atau *tampa bapolo* yang dalam bahasa Indonesia berarti tempat untuk memeluk<sup>1</sup>. Istilah lain yang diberikan adalah SSB atau Sisa-Sisa Brimob, Koramil atau Korban Rayuan Militer, dan Selebritis atau Selera Brimob dan Perintis. Sedangkan akronim yang diberikan oleh masyarakat kepada pelaku tindakan asusila dari kalangan petugas keamanan adalah Kopasus atau Korps Pegang Susu. (Gogali, 2009, pp. 57-58).

---

<sup>1</sup> Istilah lain dalam bahasa Indonesia adalah pelacur.

Pelecehan seksual oleh aparat keamanan bahkan diterima oleh aktivis organisasi non-pemerintah lokal Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) yang bermaksud untuk membantu para perempuan mendapatkan keadilan melalui tanggung jawab aparat yang sudah menghamili mereka. Para korban yang didampingi oleh aktivis mendatangi Kantor Polisi atau tempat dinas pelaku pelecehan seksual dari kalangan aparat keamanan. Namun pelayanan yang mereka terima justru sangat mengecewakan.

“Apa buktinya? Coba jelaskan apakah saat itu terjadi posisi (pemeriksaan/pelecehan seksual) tangan korban ada dimana? Di atas atau di bawah? Kalau di atas, itu namanya bukan pemeriksaan. Itu pasti juga karena perempuan menyukainya. Kalau perempuan juga mengeluarkan cairan, itu tidak bisa dituduh sebagai pemeriksaan karena dilakukan sama-sama suka.” (Gogali, 2009, p. 51).

Untuk dampak konflik yang menimpa anak-anak jauh lebih kompleks dari dampak konflik pada kaum perempuan. Dampak dari pengrusakan dan pembakaran fasilitas-fasilitas umum selama konflik 1998-2001 berarti juga menghilangkan sekolah-sekolah sebagai sarana untuk menuntut ilmu bagi mereka. Pada masa konflik, semua bangunan yang tersisa diprioritaskan menjadi kamp pengungsian sehingga untuk memiliki tempat ibadah maupun sekolah apalagi pasar bukan merupakan fokus utama saat itu. Disisi lain, membangun kembali fasilitas-fasilitas umum pasca konflik seperti sekolah, pasar, maupun tempat ibadah bukanlah sesuatu yang mudah dan murah.

Pada bulan Mei tahun 2000 saja terdapat tiga sekolah yang hancur yaitu satu Sekolah Menengah Utama (SMU), satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan satu Sekolah Dasar (SD). Dua bulan setelahnya, dua pesantren dan dua SD juga dibakar.

Dan pada tahun 2002 setidaknya ada empat sekolah yang dihancurkan, yang lainnya ditutup atau sudah tidak berfungsi. (Gogali, 2009, p. 60).

Faktor lain yang menghambat pendidikan anak-anak korban konflik Poso adalah terpisahnya mereka dari anggota keluarga sehingga dalam keadaan yang dirundung kesedihan, mereka semakin tidak memiliki semangat untuk menata hidup kembali. Satu-satunya harapan mereka adalah ibu atau para perempuan yang masih selamat. Namun tidak sedikit pula anak-anak yang juga terpisah dari ibu mereka. Hal ini menyebabkan kenyamanan dan keamanan sangat sulit didapatkan bagi anak-anak korban konflik Poso karena tidak ada lagi sosok yang bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup mereka.

Ketika anak-anak korban konflik selamat bersama keluarganya, mereka harus mengungsi jauh agar terhindar dari serangan lainnya. Di tempat pengungsian, tidak semua orang menerima anak-anak korban konflik Poso seperti apa yang pernah dialami Edy.

“Sebenarnya saya malu dan iri juga melihat teman-teman saya bermain atau ke sekolah sementara saya jadi tukang becak, bantu mama dan papa saya supaya bisa makan. Kasihan mama dan papa, karena saya ingin sekolah, saya meninggalkan mereka dan sekolah ke Palu. Teman-teman sekelas sering menantang saya berkelahi dengan bilang “kamu pengungsi, anak kerusuhan, jangan buat masalah disini.” (Gogali, 2009, p. 61).

Di pengungsian, hampir semua anak bekerja untuk mencari uang agar dapat melanjutkan hidupnya. Edy bukanlah satu-satunya anak yang harus membanting tulang untuk keperluan hidupnya, Nora juga bernasib serupa.

“Sekarang sudah tidak ada lagi malu jadi penjual ikan. Bahkan sudah tidak pikir mau sekolah lagi karena sudah tidak mungkin. Lebih baik sekarang cari kerja, supaya bisa makan tiap hari. Terserah orang mau bilang apa. Saya bangga kok sudah punya pekerjaan sendiri dan bisa menentukan sendiri kalo merasa capek bisa istirahat. Biar saja yang lain sekolah, toh mereka masih punya orang tua. Sementara saya, tau diri lah...saya tidak tahu juga ini sampai kapan dan bagaimana nanti ke depan, tapi tidak usah mikir yang sulit-sulit. Sudah lama sekali kita hidup dalam kesulitan, jadi jangan dibuat susah.” (Gogali, 2009, pp. 53-54).

Nora dan Edy bisa dikatakan memiliki nasib yang lebih baik karena dapat segera beradaptasi, berbeda dengan balita-balita yang memiliki keterbatasan gerak dan komunikasi untuk mengutarakan apa yang mereka inginkan dan rasakan. Para balita turut hidup nomaden tanpa alas dan atap sebagai pelindung dari panas dan hujan, dan tak jarang mereka harus mengungsi ke kebun, hutan, sawah dengan keterbatasan makanan dan minuman.

“Saya bingung sekali sampai ikut menangis karena anak saya yang usia tiga tahun sepanjang hari menangis minta susu. Mana mungkin ada susu di tengah hutan? Awalnya anak saya tidak keberatan saya ganti susu dengan perasan air tebu yang kami temui di kebun, tapi hari keempat dia menangis terus minta susu. Itu bikin kalang kabut semua pengungsi, jangan sampai suaranya kedengaran keluar oleh orang-orang yang ingin mengejar dan membunuh kami. Hari keenam, sekitar empat orang nekat turun ke kota ambil susu yang kami perkirakan masih tersisa di rumah, sekalian mengambil perbekalan makanan buat yang lain. Eh, ternyata semua sudah hancur. Jangankan susu, mie instan atau apalah, sofa, meja, lemari saja sudah tidak ada dan rumah sudah rata dengan tanah.” (Gogali, 2009, p. 63).

Penderitaan anak-anak korban konflik Poso tahun 1998-2001 tidak cukup sampai disitu, masih banyak anak-anak berusia remaja yang mendapatkan pelecehan seksual bahkan pemerkosaan oleh pihak lawan bahkan oleh aparat keamanan yang seharusnya mengamankan posisi mereka di tengah-tengah konflik. Anak-anak menjadi sasaran yang tepat untuk menyalurkan naluri seksual para lelaki yang tidak bertanggungjawab karena mereka memiliki keterbatasan emosi dan pengetahuan

tentang seksualitas. Pelecehan yang paling umum diterima anak-anak korban konflik Poso adalah kata-kata kotor yang ditujukan kepada anak-anak perempuan, meraba payudara mereka atau menunjukkan alat kelamin kepada anak-anak perempuan tersebut. (Gogali, 2009, p. 64).

Beberapa anak perempuan korban pemerkosaan bahkan dipaksa atau terpaksa menggugurkan kandunganya karena *stress* dan tak kuasa menahan rasa malu. Seorang anak dari Desa Tokorondo diperkosa hingga hamil saat usianya masih 14 tahun. Di tengah masa kehamilannya, ia dipaksa Husein Hasyim salah seorang anggota TNI 711 untuk menggugurkan kandunganya dengan cara membohongi anak tersebut untuk diajak ke Palu dengan alasan akan menikahnya. Sesampainya di Palu, ternyata ia dibawa ke rumah sakit untuk digugurkan kandungannya. (Laporan Tahunan KPKP-ST, 2004)

Terdapat pula Jane, remaja 14 tahun yang diperkosa oleh anggota Brimob asal Gorontalo pada masa konflik Poso 1998-2001. Atas kehamilannya, ia melahirkan seorang anak yang kemudian dijatuhkan hingga tewas karena Jane tidak sanggup menahan malu atas kejadian yang menimpanya. (Gogali, 2009, p. 65).

Berbagai kejahatan kemanusiaan yang terima oleh perempuan dan anak-anak di atas adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan HAM fundamental sesuai Konvensi Jenewa 1949 yang dijadikan acuan oleh Penulis dalam penelitian ini.

### **3.2. Peran SFCG sebagai Organisasi Internasional yang Bekerja Sesuai Teori Resolusi Konflik Galtung Jenis *Peacebuilding***

Sesuai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, SFCG adalah INGO yang sudah berdiri selama 35 tahun secara global dan sudah berdiri selama 15 tahun di Indonesia. SFCG juga merupakan INGO yang bergerak di bidang konflik dan perdamaian dengan tujuan utama yakni mengakhiri konflik dan kekerasan melalui transformasi konflik jenis *peacebuilding*. Tujuan INGO ini dirasa sesuai dengan salah satu landasan teori yang digunakan oleh Penulis tentang resolusi konflik jenis *Peacebuilding* oleh Johan Galtung pada tahun 1996.

Seperti organisasi-organisasi pada umumnya, SFCG memiliki rangkaian program dan kegiatan yang diwujudkan guna mencapai tujuannya. Keefektifan kinerja organisasi ini dapat dinilai melalui indikator-indikator yang telah ditentukan, dalam penelitian ini Penulis menggunakan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Jane Nelson pada tahun 2007. Menurut Nelson, INGO yang bergerak di bidang konflik memiliki 6 fungsi yang sebagian besar diterapkan. Indikator tersebut sekaligus akan menjawab rumusan masalah penelitian ini tentang bagaimana efektivitas peran *Search for Common Ground Indonesia* dalam menangani dampak kejahatan kemanusiaan pasca konflik di Poso tahun 2009-2016?

Indikator yang digunakan dalam menganalisa efektivitas peran SFCG dalam menangani kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak-anak korban konflik Poso tahun 2009-2016 antara lain:



- a. INGO melakukan advokasi, analisis, dan peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu bertindak sebagai suara rakyat baik secara langsung maupun tidak; meneliti, menganalisis, dan menginformasikan masyarakat mengenai suatu isu; mendorong masyarakat untuk ikut bertindak dalam suatu isu melalui kampanye media dan bentuk-bentuk aktivisme lain.
- b. Perantaraan, yaitu bertindak sebagai pihak penengah negosiasi di antara kelompok-kelompok dan sektor-sektor yang berbeda.
- c. Resolusi konflik, yaitu bertindak sebagai mediator dan atau fasilitator bagi pihak-pihak yang sedang bersitegang.
- d. Peningkatan sumber daya masyarakat, yaitu menyediakan pendidikan, pelatihan, atau informasi.
- e. Pelayanan masyarakat, yaitu memberikan layanan kemanusiaan, pembinaan, dan/atau sosial yang dibutuhkan masyarakat.
- f. Evaluasi dan pengawasan, yaitu bertindak sebagai pengawas pihak ketiga/independen, baik secara sukarela atau atas permintaan suatu pihak, terhadap kinerja, akuntabilitas, dan transparansi suatu pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi. Evaluasi dan pengawasan yang dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap setiap program yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

### **3.3. Analisa Efektivitas Program Internal dan Eksternal**

Berdasarkan indikator pada subbab di atas, maka efektivitas peran SFCCG dalam menangani kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak-anak korban konflik Poso 2009-2016 dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi sebagian besar dari keenam indikator, yaitu (1) Melakukan advokasi, analisis, dan peningkatan kesadaran masyarakat, (2) Perantaraan, (3) Resolusi konflik, (4) Peningkatan sumber daya masyarakat, (5) Pelayanan masyarakat, (6) Evaluasi dan pengawasan.

Penjabaran sarana indikator tersebut adalah sebagai yang tertera dalam subbab berikut mengenai program-program yang dilaksanakan SFCCG baik yang bersifat internal maupun eksternal berdasar wawancara tanggal 17 Januari 2017 dengan *Project Manager SFCCG* untuk Poso Hardya Pranadipa dan asistennya, Frinsoni Nainggolan. Beberapa informasi juga didapatkan melalui wawancara dengan Ibu Nurtahumil tanggal 19 Januari 2017 selaku perempuan korban konflik Poso yang kini menjadi aktivis lokal, dan wawancara via telepon dengan Lian Gogali tanggal 4 September 2016 selaku perempuan korban konflik Poso dan kini menjadi direktur sekolah perempuan Mosintuwu Institut.

### **3.3.1. Program Internal: Komik Perjalanan Mencari Sahabat**

#### **a. Melakukan Advokasi, Analisis, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Advokasi yang dilakukan SFCG kepada masyarakat melalui program ini adalah dengan mengorganisir anak-anak korban konflik ke dalam suatu wadah yang kemudian disebut Sekolah Darurat. Hal ini bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik agar dapat berinteraksi satu sama lain. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada awalnya sebelum adanya Sekolah Darurat anak-anak hanya mau bermain dengan teman sebayanya sesuai agama yang dianut, itu berarti terdapat kelompok bermain Islam dan kelompok bermain Kristen pasca konflik. Setelah bertemunya anak-anak tersebut dalam Sekolah Darurat, yang semula terpisah sesuai agama kini dapat bersatu kembali dan bermain bersama tanpa memandang agama yang dianutnya.

Dalam hal analisis, SFCG memutuskan membuat komik Perjalanan Mencari Sahabat untuk program perdananya di Poso. Hal ini merupakan hasil observasi dan analisis kepada anak-anak yang ternyata lebih gemar menggambar dan mewarnai selain bermain bersama. Setelah mendengar aspirasi tersebut, ditemukan bahwa persoalan anak-anak korban konflik adalah ingin menggambar dan mewarnai karena sekian lama mereka tidak dapat melakukannya akibat konflik. Solusinya, SFCG memfasilitasi anak-

anak dengan peralatan menggambar dan mewarnai agar dapat mewujudkan keinginannya. Selain itu, SFCG juga menggabungkan keduanya kedalam bentuk visual ke dalam sebuah komik sebagai wujud persembahan SFCG untuk anak-anak korban konflik.

Untuk meningkatkan kesadaran anak-anak korban konflik, SFCG menciptakan sebuah komik yang awalnya berjudul Perjalanan Mencari Sahabat. Komik tersebut berkisah tentang kehidupan masyarakat Poso sebelum konflik pada puncaknya. Kehidupan mereka tergambar sangat harmonis, saling membaaur antara Islam dan Kristen hingga konflik muncul dan merubah segalanya. Permusuhan terjadi dimana-mana, menyebabkan berbagai kerugian dan mengancam masa depan seluruh masyarakat Poso dan sekitarnya. Oleh sebab itu, komik ini dibuat untuk menyadarkan anak-anak betapa pentingnya perdamaian dan betapa merugikannya sebuah konflik melalui bentuk visual yang emnarik dan mudah dipahami. Akibat konflik timbul berbagai kerugian seperti kehilangan orang tua, teman, keluarga, sekolah, tempat ibadah, rumah, dan harta benda lainnya yang membuatnya tidak dapat merasakan kehidupan normal sebagai anak-anak pada umumnya.

#### **b. Melakukan Fungsi Perantaraan**

SFCG tidak melakukan fungsi perantaraan di Sekolah Darurat. Hal ini karena meski terdapat dua kelompok yang berbeda kepentingan, namun kehadiran SFCG tidak berada di tengah-tengah mereka yang sedang

melakukan negosiasi atau mencari kesepakatan untuk titik terang. Justru SFCG yang mempertemukan kedua kelompok tersebut dengan tujuan lain.

### **c. Melakukan Fungsi Resolusi Konflik**

Dalam mengagendakan pertemuan hingga terbentuknya Sekolah Darurat, SFCG sudah melaksanakan tugasnya dalam upaya resolusi konflik yang bertindak sebagai mediator dan fasilitator bagi anak-anak yang bersitegang akibat konflik. SFCG dibantu aktivis lokal bersama Bapak Ibrahim dan Ibu Nurtahumil memfasilitasi pertemuan tersebut mulai dari pendekatan secara terpisah kepada anak-anak di pemukiman Islam dan anak-anak di pemukiman Kristen, hingga pertemuan mereka untuk bermain bersama-sama di Sekolah Darurat.

Pada awal bertemunya mereka di Sekolah Darurat, timbul masalah baru dimana posisi duduk mereka secara alami terbentuk berdasar agama. Satu sisi anak-anak beragama Islam dan sisi lainnya anak-anak beragama Kristen. Dari sinilah fungsi SFCG untuk memediasi anak-anak agar mau menerima satu sama lain meski agamanya berbeda. Mediasi tersebut dilaksanakan dengan cara mengkondisikan anak-anak untuk duduk berselingan dan harus berkenalan satu sama lain sambil tertawa. Hal ini berhasil membuat suasana menjadi hangat dan sangat akrab.

Bentuk resolusi konflik ini adalah bersatunya kembali anak-anak korban konflik dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang sebelumnya terhalang oleh agama. Setelah pertemanan mereka terjalin dari Sekolah Darurat, anak-anak memiliki semangat baru untuk lebih produktif di hari yang akan datang. Hal ini karena anak-anak tersebut memiliki lebih banyak teman untuk bermain dan menghabiskan waktu di sekitar pemukiman daripada harus mengkhawatirkan respon untuk bertemu teman yang berbeda agama seperti sebelumnya.

#### **d. Membantu Meningkatkan SDM**

SFCG turut meningkatkan SDM Poso melalui sebuah permainan Piramida Perdamaian bersama sekitar 25 anak korban konflik di Sekolah Darurat. Permainan ini dimainkan berkelompok dengan 4-5 orang per kelompok. Setiap kelompok harus saling bekerjasama membangun piramida setinggi dan sekokoh mungkin menggunakan diri mereka masing-masing. Dari permainan Piramida Perdamaian mengajarkan kita bahwa meskipun perdamaian sangat sulit untuk diwujudkan dan mengalami berbagai kendala atau kegagalan serta membutuhkan kerja keras, namun ketika berhasil mewujudkan perdamaian tersebut akan sangat menyenangkan bagi semua orang. (Gogali, p. 161)

Dari permainan yang dilakukan di tengah kegiatan mendongeng tersebut dapat meningkatkan sekitar 25 sumber daya manusia melalui anak-anak Poso pasca konflik. Selain peserta, aktivis lokal seperti Ibu Nur, Bapak Ibrahim, Kak Lian Gogali yang membantu jalannya kegiatan Sekolah Darurat juga memiliki ilmu tambahan untuk diterapkan dimanapun mereka bertugas dalam membangun perdamaian.

#### **e. Pelayanan Masyarakat**

SFCG melakukan pelayanan masyarakat berbentuk pembinaan kepada anak-anak korban konflik yang juga disebut sebagai murid Sekolah Darurat. Pembinaan tersebut berbentuk upaya untuk mempersatukan kedua kubu untuk saling bersatu, berteman dan menerima satu sama lain tanpa melihat perbedaan teruatam agama yang dianutnya melalui permainan, kegiatan mendongeng, maupun menggambar dan mewarnai. Dari pembinaan ini, SFCG mengajak seluruh murid untuk bersama-sama melupakan konflik masa lalu dan menyusun masa depan agar keadaan menjadi jauh lebih baik. Hasilnya, anak-anak saling bekerjasama dalam permainan, saling meminjam kebutuhan menggambar dan mewarnai sehingga mereka berkomunikasi dan menjadi teman baik. Dengan adanya pembinaan tersebut anak-anak korban konflik mau membaur dan berteman dengan yang lainnya meskipun berbeda agama. Hal ini dilakukan tidak hanya dalam lingkup Sekolah Darurat saja, namun juga diluar jam Sekolah Darurat.

## **f. Evaluasi dan Pengawasan**

Dalam hal ini SFCG hanya menjalankan fungsi evaluasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap program komik yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan setelah komik *Perjalanan Mencari Sahabat* menyelesaikan halaman terakhirnya. Ternyata dengan selesainya komik ini, masih banyak permintaan dari murid Sekolah Darurat kepada SFCG untuk menerbitkan komik serupa. Itu artinya Komik *Perjalanan Mencari Sahabat* mendapat respon positif dari masyarakat dan dapat diterima dengan baik. Akhirnya setelah melakukan perundingan bersama tim *Common Ground Productions*, SFCG memutuskan untuk membuat komik serial lanjutan dari *Perjalanan Mencari Sahabat* yang kemudian berganti judul menjadi *Pesantren Terakhir*. Komik *Pesantren Terakhir* hingga kini telah memiliki enam seri yang tetap mengangkat kehidupan masyarakat lokal sebagai topik utama di setiap ceritanya seperti kehidupan Pesantren Walisongo yang melegenda di Poso dan sejarah persaudaraan Islam dan Kristen di Poso, Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, maka kepuasan terhadap komik *Pesantren Terakhir* dapat meningkat sesuai harapan kedua belah pihak baik SFCG maupun anak-anak korban konflik. SFCG memiliki kepuasan tersendiri dapat melayani anak-anak sesuai apa yang mereka inginkan, dan anak-anak juga senang akan hadirnya serial komik lanjutan yang mereka sukai. Beberapa testimoni tentang komik tersebut datang dari beberapa murid Sekolah Darurat seperti Upi (17)



dan Atik (15) yang menyukai komik tersebut karena gambar, warna, serta karakternya selalu bagus dan ceritanya sangat menarik. Berbeda dengan Upi dan Atik, Zilvia (15) sangat menyukai karakter-karakter di dalamnya karena mudah dipahami dan sesuai dengan apa yang ada di kehidupan sosialnya. Sementara Deni (13), kini bisa lebih mengetahui kehidupan agama lain yang berbeda dengannya sehingga lebih menghormati perbedaan. (Pesantren Terakhir, p. 35)

### **3.3.2. Program Internal: *Leading Fellowship Program (LFP)***

#### **a. Advokasi, Analisis, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Pada program ini, SFCG hanya melakukan fungsi advokasi dan peningkatan SDM tanpa melaksanakan fungsi analisis. Advokasi yang dilakukan adalah dengan mengorganisir 175 peserta dari Poso dan Palu ke dalam suatu kegiatan *workshop* yang berfokus pada pengembangan dan penguatan kapasitas kepemimpinan dalam inisiatif bina damai. Dalam kegiatan ini SFCG menyampaikan empat materi utama yang berkaitan dengan manajemen konflik dan menghindari kekerasan/gerakan ekstrimis yaitu Manajemen Konflik, Pemetaan Konflik dan Intervensi, Perkenalan kepada Studi Perdamaian dan Tindakan Tanpa Kekerasan, dan Memahami Kekerasan Ekstrimisme. Sehingga dari kegiatan ini diharapkan 175 calon pemimpin Sulawesi Tengah tersebut memiliki jiwa kepemimpinan dari hati yang mampu

merubah masa depan Poso pasca konflik menjadi lebih baik dan mencegah terjadinya konflik semula di masa yang akan datang.

Selain itu, melalui *workshop* FLP diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bagi 175 pesertanya agar dapat bekerjasama dari konflik dan kekerasan di masa yang akan datang dengan cara-cara yang bijaksana dan tidak merugikan satu sama lain. Karena apabila masyarakatnya tidak memiliki kesadaran yang tinggi akan bahaya konflik, maka sangat memungkinkan terjadinya konflik serupa atau lebih buruk di masa yang akan datang yang akan menimbulkan korban lebih banyak terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak.

#### **b. Melaksanakan Fungsi Perantaraan**

SFCG tidak melakukan fungsi perantaraan melalui kegiatan LFP. Hal ini karena tidak terdapat dua kelompok yang berbeda kepentingan dalam kegiatan ini. Kehadiran SFCG juga tidak berada di tengah-tengah mereka yang sedang melakukan negosiasi atau mencari kesepakatan untuk titik terang. Justru anak-anak muda peserta kegiatan LFP hadir karena memiliki titik temu untuk mengikuti kegiatan LFP, bukan kepentingan masing-masing untuk bernegosiasi akan suatu isu.

### **c. Melaksanakan Fungsi Resolusi Konflik**

SFCG juga melaksanakan fungsi resolusi konflik sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan FLP di Sulawesi Tengah, khususnya Poso dan Palu. Empat materi pokok yang telah disusun beserta tujuan dan metodenya diberikan langsung oleh *officer* SFCG yang bertugas seperti Bapak Hardya Pranadipa, Ibu Anggia Paramestri, Bapak Agus Nahrowi, dan Bapak Suraji. Segala kebutuhan dipersiapkan oleh SFCG agar para peserta mendapatkan pemahaman dan pengetahuan lebih baik tentang manajemen konflik dan upaya-upaya untuk menghindari kekerasan ekstrimisme, mulai dari perizinan dan tempat pelaksanaan kegiatan di SMA N 1 Poso, Madrasah Aliyah Al-Ikhlas, STAI Poso, Universitas Al-Khaairat Palu, SMA Madani, SMA Al-Khaairat, dan Universitas Tadulako, konsumsi, materi, keperluan teknis seperti laptop dan proyektor, hingga kenang-kenangan yang diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat.

Fungsi resolusi konflik yang dilaksanakan oleh SFCG ini juga mempertemukan para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, sehingga SFCG turut berperan dalam mempersatukan kembali anak-anak muda Sulawesi Tengah yang masih memiliki dendam di masa lalu akibat konflik 1998-2001.

#### **d. Membantu Meningkatkan SDM Poso**

Dari 1.046 anak muda yang tergabung dalam kegiatan ini, 175 peserta diantaranya berasal dari Sulawesi Tengah khususnya Poso dan Palu (Search for Common Ground, 2015, p. 15). Hal ini berarti SFCG turut meningkatkan 175 SDM Sulawesi Tengah melalui empat materi unggulan yang diberikan selama program LFP berlangsung seperti manajemen konflik, intervensi, studi perdamaian, dan memahami kekerasan ekstrimisme (Search for Common Ground, 2015, p. 7). Melalui pendidikan manajemen konflik dan bina damai tersebut, SFCG turut membantu dalam meningkatkan SDM masyarakat khususnya bagi 175 peserta agar menjadi pemimpin yang bijaksana dan berhati mulia. Hal ini diperlukan agar Poso terhindar dari berbagai konflik dan kekerasan di masa yang akan datang yang mampu merugikan lingkungan sekitarnya.

Salah satu partisipan dari acara ini, Donny Fadhillah menyatakan bahwa dengan adanya *workshop* LFP membuka pikirannya untuk berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan yang ada, terutama agama.

“Setelah saya melihat "Sama Tapi Beda", saya merasa termotivasi untuk berlatih toleransi beragama dalam hidup saya. Kedepan, saya tidak akan berteman berdasarkan agama mereka. Saya akan berusaha untuk menjalin persahabatan dengan orang lain meski ada pembagian agama.” (Search for Common Ground, 2015, p. 6).

Menurut keterangan Donny di atas, setelah ia melihat salah satu video dokumenter yang ditampilkan di tengah-tengah rangkaian acara LFP kini ia

lebih membuka pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan agama yang dianutnya. Hal ini berarti SFCG juga turut membantu 175 pemuda sekitar termasuk Donny untuk lebih bertoleransi kepada sesama dan mewujudkan perdamaian di lingkungannya agar konflik tidak terjadi lagi dan menyebabkan lebih banyak perempuan dan anak-anak menjadi korban selanjutnya.

#### **e. Melakukan Pelayanan Masyarakat**

Dalam kegiatan ini, SFCG tidak melakukan pelayanan masyarakat dalam bentuk layanan kemanusiaan, layanan sosial, maupun pembinaan sesuai parameter yang digunakan dalam penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat akan bahaya konflik dan pentingnya perdamaian melalui *workshop* yang berlangsung tidak lebih dari tiga jam. Karena kegiatan ini juga dilakukan di 10 kota lainnya di Indonesia, lebih tepatnya dapat disebut sebagai *roadshow*.

#### **f. Melakukan Evaluasi dan Pengawasan**

Dalam hal ini, SFCG hanya melakukan fungsi evaluasi. Pengawasan tidak dilaksanakan karena program ini merupakan program satu hari yang berbentuk *workshop* sehingga menjadi program jangka pendek yang tidak memerlukan pengawalan dan pengawasan jangka panjang untuk mencapai tujuan. Evaluasi dilaksanakan melalui sebuah *pre* dan *post test* dalam kegiatan tersebut. Dari hasil tes, diketahui bahwa 57% masyarakat kini lebih paham

bahwa konflik kekerasan. 60% diantaranya juga sepakat bahwa perbedaan agama tidak selalu mendorong terjadinya konflik atau kekerasan, sehingga agama tidak bisa dijadikan alasan atas sebuah konflik atau kekerasan. Selain itu, 57% peserta sadar bahwa dialog dan mendengarkan secara aktif sangat diperlukan untuk menghindari atau bahkan menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung. (Search for Common Ground, 2015, pp. 19-20)

### **3.3.3. Program Internal: *Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity***

#### **a. Melakukan Advokasi, Analisis, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Melalui program ini SFCG melakukan fungsi advokasi dengan cara mengorganisir peserta untuk mengikuti rangkaian pelatihan yang dilaksanakan selama lima hari di Poso dan Palu. Pelatihan tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman lebih dalam mengenai manajemen konflik, bina damai, dan dapat menjalin kerja sama dengan media untuk menyebarkan perdamaian agar tidak terjadi konflik serupa di masa yang akan datang.

Sebagai bentuk analisa yang dilakukan SFCG pada kegiatan *Peace Leaders Camp*, peserta dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan peminatan yakni menjadi agen perdamaian berdasarkan jiwa kepemimpinan yang dimiliki atau *Peace Leader*, atau menjadi agen perdamaian yang memanfaatkan teknologi di kelompok *Multimedia Creative for Peace*. Kedua jenis agen perdamaian ini nantinya akan berkolaborasi dalam melaksanakan

kegiatan guna membangun perdamaian di daerahnya. Dengan demikian, SFCG juga dapat dengan mudah dalam menganalisis kekuatan anak muda dalam menjadi agen perdamaian melalui segi inisiator maupun *creator*. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi *Peace Leaders* maupun SFCG sendiri. SFCG akan lebih mudah dalam menyusun materi yang diinginkan peserta namun tetap pada tujuan kegiatan, sedangkan *Peace Leaders* akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik sesuai minat dan bakat masing-masing.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya konflik dan gerakan ekstrimisme, SFCG memberikan tujuh materi penting yang berkaitan dengan manajemen konflik, bina damai, dan memanfaatkan media dengan bijaksana. Ketujuh materi tersebut antara lain: Manajemen Konflik; Pemetaan konflik dan Intervensi; Perkenalan kepada Studi Perdamaian dan Tindakan Tanpa Kekerasan; Memahami Kekerasan Ekstrimisme; Sosial media dan Strategi Komunikasi dalam *Peacebuilding*; Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat untuk Membangun *Peacebuilding*, dan Mempertahankan Gerakan Berkelanjutan. Melalui materi-materi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari akan bahaya konflik yang bersifat destruktif dan kekuatan media yang sangat berpotensi dalam membangun perdamaian di era digital.

## **b. Melaksanakan Fungsi Perantaraan**

SFCG tidak melaksanakan fungsi perantaraan melalui kegiatan ini. Karena SFCG tidak hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang melakukan negosiasi untuk mencapai suatu keputusan tertentu. Justru SFCG yang mempertemukan anak-anak muda yang berbeda latar belakang tersebut untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menyebarkan perdamaian ke lingkungan masyarakat yang lebih luas di Sulawesi Tengah.

## **c. Melaksanakan Fungsi Resolusi Konflik**

Dalam menjalankan fungsi resolusi konflik, SFCG menjadi fasilitator dalam membangun perdamaian di Poso. SFCG memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan selama pelatihan seperti akomodasi, konsumsi, perlengkapan, dokumentasi, dan hal-hal teknis lainnya dalam kebutuhan multimedia seperti proyektor maupun kamera DSLR canggih.

Selain keperluan umum di atas, SFCG juga memfasilitasi peserta dengan kebutuhan khusus sesuai peminatan yang dipilihnya. Misalnya pada kelompok *Peace Leader*, SFCG memfasilitasi 26 peserta dengan materi-materi dasar yang lebih kreatif mengenai resolusi konflik dan perdamaian. Misalnya melalui permainan Kepalan Tangan, Negosiasi Tak Berujung, Negosiasi Jeruk, dan Menggambar Berpasangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk merangsang kreativitas peserta dalam memahami konflik dan



mewujudkan perdamaian sehingga dapat dengan mudah disebarkan kedalam lingkup terdekatnya dengan cara yang mengasyikkan. Selain itu, pada kelompok ini peserta berkesempatan untuk berdiskusi dengan fasilitator undangan Bapak Moch. Ridwan yang berprofesi sebagai wartawan lokal yang sering meliput konflik Poso pada masanya. Bapak Ridwan juga merupakan salah satu fasilitas yang diberikan SFCG kepada para peserta terpilih untuk lebih memahami tujuan kegiatan yang diselenggarakan selama lima hari tersebut.

Sedangkan pada kelompok *Multimedia Creative for Peace*, pemikiran tentang resolusi konflik dan perdamaian diserahkan kepada masing-masing peserta sesuai kemampuan dan kreativitas individu. Dalam kelompok ini peserta mendapatkan keterampilan teoritis dan teknis tentang bagaimana menghasilkan produk multimedia tertentu seperti Video Dokumenter, Desain Poster, atau Konten dan Desain Blog yang kreatif. Meskipun konten yang diciptakan dibebaskan sesuai kreativitas individu, namun materi dasar yang diterima diberikan langsung oleh pembuat konten kreatif dari *Common Ground Productions* Kakak Trisno Adi dan Kakak Nor Ismah.

#### **d. Membantu Meningkatkan SDM Poso**

Melalui program ini, SFCG turut membantu meningkatkan SDM masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan selama lima hari pada tanggal 7-11 Mei 2015 di Universitas Tadulako. Selama pelatihan, 26 peserta

*Multimedia Creative for Peace* berhasil menciptakan 14 *blog* dan 13 poster dengan konten kreatif bertema perdamaian atas bimbingan Kakak Trisno Adi dan Kakak Nor Ismah (Search for Common Ground, 2015, p. 4). Menurut salah satu peserta dari kelompok multimedia Rifky M. Pallu dari Universitas Tadulako, pelatihan ini sangat bermanfaat karena juga memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai radikalisme dan ekstrimisme yang dapat dicegah melalui bentuk visual.

"Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang radikalisme dan ekstrimisme sehingga saya dapat mengambil tindakan untuk mempromosikan perdamaian dan kesatuan. Pelatihan ini mendorong saya untuk memberi tahu teman saya bahwa ekstrimisme harus dilawan. Saya juga belajar melalui pelatihan ini bahwa media visual dalam bentuk poster dapat memberikan suara yang kuat untuk melawan ekstrimisme." (Search for Common Ground, 2015, p. 20)

Peningkatan SDM juga dialami oleh Cindy Vita dari SMA Model Terpadu Madani Palu. Cindy adalah seorang Kristen yang biasa hidup sebagai kaum minoritas sejak kecil. Posisinya sering terancam terlebih pasca konflik 1998-2001. Karena lelah dengan kehidupan sebagai kaum minoritas, Cindy pernah bercita-cita untuk migrasi ke Jawa mengikuti keluarganya yang lain. Namun setelah bergabung menjadi bagian dari program ini, Cindy merasa lebih paham bagaimana untuk berdamai dengan konflik. Ketika ia memiliki kesempatan untuk bermigrasi selepas masa SMA, Cindy justru memilih untuk melanjutkan pendidikan di Sulawesi. Bahkan ia mempengaruhi saudaranya untuk tidak meninggalkan Palu. Ia juga menghimbau saudaranya yang sedang

melanjutkan studi di Jawa untuk segera pulang karena perdamaian bisa dimulai dari diri sendiri. (Search for Common Ground, 2016, pp. 31-35)

**e. Melakukan Pelayanan kepada Masyarakat**

SFCG memberikan pelayanan berbentuk pembinaan yang diberikan kepada alumni peserta *Peace Leaders Camp* yang secara otomatis menjadi jaringan SFCG sebagai *Peace Leaders*. Hal ini karena pasca kegiatan, alumni mendapatkan tugas wajib yang harus dilaksanakan selama 6-12 bulan pasca *Peace Leaders Camp*. Para alumni harus mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh dari pelatihan ini kepada masyarakat sekitar yang lebih luas. Para alumni diberi waktu satu bulan pasca kegiatan untuk membuat proposal kegiatan yang harus dikirimkan kepada SFCG agar mendapat pembinaan lanjutan.<sup>2</sup>

Para alumni dari Sulawesi Tengah baik Poso maupun Palu sepakat untuk membuat kegiatan pelatihan dan pemutaran film di hari Perdamaian Internasional yang akan diperingati pada bulan September hingga November 2015. Pada agenda yang bersamaan, SFCG juga memiliki agenda Festival Perdamaian *Peace 360* yang akan dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk turut serta dalam meramalkan peringatan Hari Perdamaian Internasional di Indonesia. Pembinaan ini juga diberikan dalam bentuk uang tunai senilai jutaan rupiah

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan SFCG, 17 Januari 2017.

untuk mencukupi segala persiapan para alumni untuk menjalankan kewajibannya seperti konsumsi, transportasi, kebutuhan komunikasi, persewaan *sound system*, proyektor, dan kenang-kenangan dari acara ini.

#### **f. Evaluasi dan Pengawasan**

Evaluasi dilaksanakan oleh SFCG pada akhir kegiatan dan menemukan beberapa kesimpulan dari pelatihan yang dilaksanakan selama lima hari tersebut, diantaranya adalah 47% peserta mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman dalam manajemen konflik serta pengetahuan terkait melawan kekerasan ekstremisme. Selain itu, 37% peserta juga lebih memilih pendekatan tanpa kekerasan sembari mengelola konflik dan 16% diantaranya menghindari diskriminasi berbasis agama dan etnis. (Search for Common Ground, 2015, pp. 19-20)

Sedangkan untuk peserta dari kelompok multimedia, para peserta memperoleh 60% pengetahuan dan pemahaman lebih dari sebelumnya tentang pengaruh media terhadap konflik dan perdamaian serta implementasi media dalam *peacebuilding*. Selain itu, 20% peserta merasa lebih optimis dari sebelumnya dengan kemampuan dan peran mereka dalam menggunakan media sebagai alat *peacebuilding* jangka panjang. (Search for Common Ground, 2015, pp. 19-20)

Pengawasan juga dilakukan oleh SFCG selama kegiatan berlangsung. Hal ini dilakukan agar peserta tetap berada pada agenda kegiatan dan

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan sarana kampus maupun kecelakaan lain mengingat kegiatan dilaksanakan hingga lima hari di lingkungan Universitas Tadulako<sup>3</sup>.

### **3.3.4. Internal: *Student Initiatives in Peacebuilding***

#### **a. Melakukan Advokasi, Analisis, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Melalui program *Student Initiatives in Peacebuilding*, SFCG hanya melakukan fungsi advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Advokasi dilakukan dengan cara memberikan mata pelajaran agama tambahan yang berbasis kepemimpinan kepada siswa kelas X dan XI SMA/ sederajat di SMA N 4 Palu, SMA Al-Khairaat, SMA N 1 Poso, SMA N Terpadu Madani, dan MA Al-Ikhlas sebagai wujud pencegahan perekrutan anak muda kedalam kelompok ekstrimis yang sedang berkembang di Poso dan sekitarnya. Advokasi ini dilaksanakan selama satu semester atau sekitar 19 kali pertemuan di sekolah-sekolah terpilih dengan berpedoman pada modul keagamaan yang sudah disusun atas kerja sama SFCG dengan Kemenag RI. (Search for Common Ground, 2015, p. 14).

Untuk upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, SFCG memberikan lima materi utama yang dirangkum ke dalam satu modul yang berisi tentang cara menjadi pemimpin yang bijaksana dan berakhlak mulia, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif sehingga dapat terhindar dari perekrutan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan SFCG, 17 Januari 2017.

kelompok ekstrimis, dan menjadi pemimpin yang mampu menyelesaikan konflik hingga akarnya. Oleh sebab itu, SFCG juga turut meningkatkan kesadaran dari 416 pemuda Sulawesi Tengah untuk menghindari kekerasan ekstrimis berbasis keagamaan yang dianutnya karena sebenarnya segala bentuk kekerasan, balas dendam, atau bahkan membenci orang-orang yang berbeda agamanya dilarang dalam agama manapun.

**b. Melaksanakan Fungsi Perantaraan**

SFCG tidak menjalankan fungsi perantaraan dalam program *Student Initiatives on Peacebuilding* ini. Hal ini karena SFCG tidak hadir sebagai pihak penengah dalam dua kelompok yang sedang bernegosiasi di sekolah-sekolah, namun SFCG hadir untuk lebih mempererat hubungan dua kelompok yang memiliki sejarah konflik dalam satu sekolah agar lebih menerima satu sama lain dan bekerjasama untuk memerangi kekerasan ekstrimisme berbasis keagamaan.

**c. Melaksanakan Fungsi Resolusi Konflik**

Dalam melaksanakan fungsi resolusi konflik melalui program *Student Initiatives in Peacebuilding*, SFCG hanya menjalankan fungsi sebagai fasilitator dengan membantu para guru untuk memahami konten dalam modul yang diberikan sebagai panduan untuk memberikan mata pelajaran agama tambahan kepada siswanya. Fasilitas ini diberikan kepada 12 guru agama pada saat pelatihan selama empat hari di Hotel Best Western Coco Palu yang

meliputi kebutuhan materi selama satu semester, akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

Meskipun fungsi resolusi konflik tidak diterima langsung dari SFCG kepada seluruh siswa yang berpartisipasi, namun apa yang sudah disampaikan kepada bapak ibu gurunya dalam pembekalan empat hari sudah cukup mewakili tujuan dari SFCG dalam menjalankan program tersebut.

**d. Peningkatan SDM Poso**

Dari berlangsungnya program *Student Initiatives in Peacebuilding* selama enam bulan dengan 19 kali pertemuan, SFCG turut meningkatkan sekitar 428 SDM yang terdiri dari 416 murid kelas X dan XI dan 12 tenaga pendidik mata pelajaran agama dari enam SMA/ sederajat yang terpilih seperti SMA N 4 Palu, SMA Al-Khairaat, SMA N 1 Poso, SMA N Terpadu Madani, dan MA Al-Ikhlas. Kini 82% peserta setelah mendapatkan mata pelajaran agama tambahan akan menghindari kelompok/ organisasi yang terindikasi kekerasan ekstrimisme dengan cara-cara yang bijaksana sesuai apa yang sudah diajarkan oleh bapak/ibu guru. Selain itu, kini lebih dari 90% siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya toleransi antar agama dan kerjasama antar sesama untuk mencegah konflik kekerasan di masa yang akan datang.

**e. Melakukan Pelayanan Masyarakat**

Selama berjalannya kegiatan ini, SFCG melakukan pelayanan masyarakat berbentuk pembinaan namun tidak secara langsung. Hal ini karena

pembinaan dilakukan oleh bapak/ibu guru keagamaan di enam sekolah yang bekerjasama dengan SFCG untuk memerangi kekerasan radikalisme dan menghindari perekrutan anak muda kedalam organisasi ekstrimis.

Selain itu, SFCG juga melakukan layanan sosial dalam program *Student Initiatives on Peacebuilding* dalam bentuk pembinaan langsung kepada anak-anak muda yang terindikasi memiliki hubungan dengan organisasi ekstrimis di lingkungannya. Layanan sosial tersebut dilakukan secara intensif di rumah maupun rumah tahanan (rutan) oleh Bapak Agus Nahrowi dan Bapak Suryaji yang bertugas untuk isu-isu terorisme di SFCG. Dari kegiatan ini, SFCG menemukan 131 pelajar dan mahasiswa dari 13 SMA dan 14 universitas di 10 kota di Indonesia yang terindikasi dengan gerakan ekstrimis, beberapa diantaranya berasal dari Sulawesi Tengah ([www.sfcg.org](http://www.sfcg.org), 2016).

#### **f. Evaluasi dan Pengawasan**

Evaluasi dilaksanakan oleh SFCG dalam penerapan program *Student Initiatives on Peacebuilding* yang berlangsung selama enam bulan dari bulan Agustus 2015 hingga Februari 2016. Pada kegiatan ini, *survey* dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan yang dilakukan setiap bulan kepada 12 guru agama dari enam sekolah terpilih. Tim SFCG akan berkunjung ke satu sekolah dengan mengundang 12 guru agama untuk melaksanakan evaluasi rutin bulanan, evaluasi ini dilakukan dengan bergiliran sekolah-sekolah lainnya



pada bulan berikutnya. Hal ini dilakukan agar kegiatan tetap berada pada agenda yang telah disusun dan hasil yang dicapai dapat maksimal sesuai harapan.

Pada bulan keenam atau bulan terakhir, SFCG mengadakan sebuah *survey* yang dilakukan kepada seluruh siswa yang terlibat terkait peningkatan kesadaran siswa terhadap pencegahan gerakan ekstrimisme. Dari mini *survey* tersebut ditemukan data bahwa terjadi peningkatan kesadaran pada 416 siswa dimana sebanyak 76% tidak setuju terhadap tindakan ekstrimis, 82% diantaranya akan menghindari kelompok/organisasi yang terindikasi kekerasan ekstrimisme, dan lebih dari 90% siswa juga menjadi lebih sadar akan pentingnya toleransi antar agama dan kerjasama antar agama untuk mencegah konflik kekerasan di masa yang akan datang.

### **3.3.5. Internal: Festival Perdamaian: *Peace 360***

#### **a. Melakukan Advokasi, Analisis, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Festival perdamaian *Peace 360* adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan SFCG untuk memperingati hari perdamaian internasional yang jatuh setiap bulan September hingga November. Di Poso, festival perdamaian dilaksanakan oleh 17 alumni *Peace Leaders Camp* yang berkewajiban untuk membuat kegiatan dalam rangka menyebarkan perdamaian sesuai ilmu yang mereka dapatkan dari pelatihan sebelumnya.

Advokasi kepada masyarakat mengenai kegiatan ini dilakukan melalui dua hari pelatihan yang berbentuk *workshop* dan pemutaran video dokumenter. Pesertanya dibatasi hingga 100 orang yang berasal dari SMA 1 Poso, STAI Poso, MA AL-Khairaat Poso, dan MA Al-Ikhlas Poso. Dari kegiatan ini, diharapkan 17 orang dapat menyebarkan perdamaian dengan metode-metode kreatif kepada 100 orang lainnya, dan 100 orang tersebut mampu menyebarkan lagi ke lingkungan sekitarnya yang lebih luas.

SFCG juga turut meningkatkan kesadaran masyarakat melalui festival perdamaian ini, dimana perayaanya dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bersama jaringan SFCG lainnya. Dari festival perdamaian *Peace 360* yang dilaksanakan di Poso ini, masyarakat semakin sadar bahwa perdamaian itu penting hingga memiliki hari perdamaian untuk diperingati setidaknya tiga kali dalam setahun di seluruh dunia.

#### **b. Melakukan Fungsi Perantara**

Dalam kegiatan ini, SFCG tidak melakukan fungsi perantara karena *Peace 360* adalah rangkaian acara festival perdamaian untuk menyadarkan masyarakat luas akan arti penting perdamaian yang sudah mendapatkan tempat hingga kancah internasional. Sehingga dalam perayaan ini tidak ada dua kelompok yang bernegosiasi akan suatu hal dan membutuhkan SFCG untuk menjadi penengah kedua pihak tersebut.

**c. Melaksanakan Fungsi Resolusi Konflik**

Dalam menjalankan berbagai rangkaian festival perdamaian selama 60 hari, SFCG selalu memberikan dukungan penuh kepada seluruh jaringannya berupa sarana dan prasarana untuk segala kebutuhan yang diperlukan. Pada pelaksanaan *Peace 360* di Poso, SFCG bahkan memberikan dukungan materiil senilai belasan juta rupiah untuk keperluan acara seperti konsumsi, persewaan kelengkapan acara termasuk *sound system*, *emergency lamp*, proyektor, hingga kenang-kenangan yang diberikan kepada peserta agar selalu mengingat perdamaian melalui *Peace 360*. Meskipun fungsi resolusi konflik yang dilaksanakan di Poso tidak secara langsung oleh SFCG, namun perannya tetap menjadi kunci kesuksesan kegiatan *Peace 360* di Poso.

**d. Meningkatkan SDM Poso**

Melalui perayaan festival perdamaian *Peace 360* di Poso, SFCG juga membantu meningkatkan SDM mengenai bina damai dan resolusi konflik serta kerja sama dengan media yang dimulai dari lingkup terkecil yaitu 17 orang menjadi 100 orang, yang nantinya diyakini akan dikembangkan lagi kepada orang-orang selanjutnya. Hingga pada titik pelaksanaan *Peace 360* di Poso, berarti SFCG sudah meningkatkan SDM sebanyak 117 orang termasuk Redy dan Khaula.

Redy adalah seorang Kristen dari SMA 1 Poso yang tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Khaula yang beragama Islam juga dari MA

Al-Ikhlas Poso. Mereka bertemu karena secara bersamaan mengikuti rangkaian kegiatan *Peace 360* di SMA 1 Poso. Mereka berdua memiliki hobi yang sama yaitu fotografi dan *video making*. Redy dan Khaula berteman lebih akrab sejak hari kedua kegiatan *Peace 360* berupa agenda pemutaran film dokumenter dilanjutkan dengan sesi diskusi. Redy tidak menyangka bahwa Khaula adalah muslim yang baik, tidak seperti apa yang selama ini ia bayangkan akibat konflik Poso 1998-2001. Begitu juga sebaliknya, Khaula menyadari bahwa baik-buruknya seseorang tergantung pada orang itu sendiri dan bagaimana kita menyikapinya. Bukan berdasar agama yang dimilikinya. Sejak saat itu Redy dan Khaula sering bergabung bersama *Peace Leader* lain untuk menyebarkan perdamaian di Poso dan sekitarnya melalui konten-konten di media sosial. (www.sfcg.org, 2014)

**e. Melakukan Pelayanan Masyarakat**

Dalam kegiatan *Peace 360* di Poso, SFCG memberikan pelayanan masyarakat berbentuk layanan sosial atau pembinaan dalam bentuk *workshop* yang dilaksanakan oleh 17 alumni *Peace Leaders* dari Poso. *Workshop* tersebut memuat beberapa materi tentang bina damai, resolusi konflik, dan pemanfaatan media secara bijaksana untuk proses peacebuilding di Sulawesi Tengah. SFCG juga melayani setiap pertanyaan peserta yang diajukan terkait konten kegiatan maupun hal-hal lain yang masih dalam ruang lingkup perdamaian.

#### **f. Evaluasi dan Pengawasan**

Pada kegiatan *Peace 360* di Poso, SFCG tidak melaksanakan fungsi evaluasi dan pengawasan karena kegiatan tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh alumni *Peace Leaders* sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kewajiban. Sehingga evaluasi hanya dilakukan oleh alumni yang diikuti oleh tim SFCG.

### **3.3.6. Eksternal: Menkopolkam RI**

#### **a. Melakukan Advokasi, Analisis, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Dalam menjalin kerja sama dengan Menkopolkam RI, SFCG hanya melakukan advokasi pada tanggal 8 Maret 2004 di kantor Menkopolkam RI yang berlokasi di Jakarta Pusat. Dalam agenda pertemuan ini, SFCG meminta petunjuk dan saran sebelum menjalankan programnya di Sulawesi Tengah terutama Poso dan Palu pasca konflik. Selain itu SFCG juga mempengaruhi Menkopolkam agar turut mendukung berjalannya program di Poso agar tujuan organisasi dapat tercapai di Indonesia dengan beberapa penjelasan mengenai organisasi SFCG langsung oleh *Country Director* Brian Hanley. Hasil dari advokasi kepada Menkopolkam adalah dihubungkannya SFCG dengan pemerintah daerah Sulawesi Tengah terutama DPRD dan Polsek setempat untuk turut menjamin keamanan tim yang akan bertugas di Poso dan Palu<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan SFCG, 17 Januari 2017.

Pada kerja sama ini, SFCG tidak melakukan analisa maupun peningkatan kesadaran masyarakat bersama Menkopolhukam karena tujuan diadakan kunjungan tersebut murni untuk mendapatkan informasi dan saran dari pemerintah.

**b. Melaksanakan Fungsi Perantaraan**

SFCG tidak melaksanakan fungsi perantaraan dalam menjalin kerja sama dengan Menkopolhukam untuk program-program *peacebuilding* di Poso dan sekitarnya. Hal ini karena tidak ada pihak-pihak yang membutuhkan penengah dalam negosiasi atas permasalahan yang dialami dalam kerja sama ini.

**c. Melaksanakan Fungsi Resolusi Konflik**

SFCG tidak melaksanakan fungsi resolusi konflik dalam menjalin kerja sama dengan Menkopolhukam RI, karena sesuai definisi Resolusi Konflik yang digunakan dalam penelitian ini SFCG tidak menjadi fasilitator maupun mediator selama menjalin kerja sama dengan Menkopolhukam.

**d. Meningkatkan SDM Poso**

SFCG tidak berperan dalam peningkatan SDM Poso melalui kerja sama dengan Menkolplhukam karena belum ada program yang dilaksanakan terkait kegiatan *peaceuilding* untuk perempuan dan anak-anak di Poso pasca konflik.

**e. Pelayanan Masyarakat**

SFCG tidak melakukan pelayanan masyarakat berupa layanan sosial, layanan kemanusiaan, maupun pembinaan selama menjalin kerja sama dengan Menkopolkam. Hal ini karena SFCG belum menjalankan program apapun ketika dilaksanakan kunjungan ke kantor Menkopolkam RI.

**f. Evaluasi dan Pengawasan**

SFCG tidak melaksanakan fungsi evaluasi maupun pengawasan terkait kerja sama dengan Menkopolkam karena kunjungan ini hanya berlangsung sekali. Selebihnya dari pihak Menkopolkam lah yang diundang dalam beberapa agenda lokakarya yang dilakukan oleh SFCG terkait program yang lain.

**3.3.7. Eksternal: Kemenag Republik Indonesia**

**a. Melakukan Advokasi, Analisis, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Kerja sama yang terjalin antara SFCG adalah hasil analisis yang diperoleh dari lokakarya yang dilaksanakan di Kantor Dirjen Pemasarakatan, Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2015. Lokakarya ini dihadiri oleh 23 tamu undangan termasuk perwakilan dari Dirjen Pemasarakatan, Kementerian Sosial, BNPT, Yayasan Prasasti Perdamaian, rekan media, dan Kemenkopolkam. Dari acara ini, muncul beberapa rekomendasi kebijakan salah satunya adalah penyusunan modul keagamaan yang ditargetkan bagi

siswa-siswi SMA/ sederajat di Poso (Search for Common Ground, 2015, p. 14).

Setelah melakukan berbagai pertimbangan, SFCG melakukan advokasi kepada Kemenag dibawah pimpinan Bapak Suwardi, M.Pd selaku Kasi Kurikulum dan Evaluasi. SFCG mengutarakan tujuan kegiatan untuk menerbitkan sebuah modul keagamaan sebagai respon organisasi kepada keresahan masyarakat Poso dan sekitarnya atas isu terorisme atau gerakan ekstrimis yang sedang terjadi. Dalam hal ini, SFCG mengorganisir Kemenag untuk membantu dalam penyusunan konten yang akan dimuat karena dinilai memiliki kapasitas lebih baik perihal keagamaan daripada instansi pemerintah lain yang berkaitan dengan pendidikan. Advokasi tersebut membuahkan hasil dan Kemenag bersedia untuk kerja sama dengan SFCG dalam produksi modul tersebut.

Melalui advokasi yang dilaksanakan, SFCG bersama Kemenag turut meningkatkan kesadaran masyarakat melalui modul pendidikan yang berkualitas dan terpercaya tentang bahaya kelompok ekstrimis yang tidak ditangani dengan segera. Hal ini sangat berbahaya terutama bagi kelangsungan masa depan anak muda karena sebagian besar perekrutannya ditujukan kepada mereka.



### **b. Melaksanakan Fungsi Perantaraan**

Dalam kerja sama ini, SFCG tidak melakukan fungsi sebagai perantara karena tidak ada dua kelompok yang berbeda kepentingan sedang melakukan negosiasi untuk mencapai kepentingan bersama tersebut. Terlebih tujuan utama SFCG dalam menjalin kerja sama ini murni mengenai konten dalam modul yang akan diproduksi agar lebih luas dalam membahas resolusi konflik dan perdamaian di tengah gerakan ekstrimis.

### **c. Melaksanakan Fungsi Resolusi Konflik**

SFCG bertindak sebagai fasilitator atas segala kebutuhan yang diperlukan bagi Kemenang untuk membantu dalam menyusun modul keagamaan berbasis *peacebuilding* seperti data lapangan yang dibutuhkan. SFCG membantu Kemenag untuk memahami data-data lapangan yang berkaitan dengan gerakan ekstrimis, intoleransi, maupun konflik dan kekerasan berbasis agama yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Secara tidak langsung, SFCG menjadi fasilitator bagi masyarakat Poso dan sekitarnya untuk mencegah kekerasan ekstrimis di lingkungannya melalui modul keagamaan yang disusun atas kerja sama dengan Kemenag RI karena berdasarkan data yang dapat dipercaya dan konten yang lebih pas dengan keadaan sosial masyarakat Sulawesi Tengah.

**d. Meningkatkan SDM Poso**

Atas kerja sama SFCG dengan Kemenag, berarti turut meningkatkan SDM Poso agar dapat bekerjasama melalui konflik, menghindari kekerasan, dan mewujudkan perdamaian dengan cara yang lebih inovatif dan mudah dipahami. Misalnya dalam modul tersebut berisi beberapa materi perdamaian kreatif yang disajikan dalam bentuk permainan, contohnya Kepalan Tangan, Negosiasi Jeruk, Tali Tak Berujung, Menggambar Berpasangan, Jendela Johari, dan sebagainya. Pada dasarnya, intisari dari permainan tersebut adalah akan selalu ada berbagai cara untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, bahkan cara tersebut dapat berupa kerja sama yang sama-sama menguntungkan. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konflik hingga akhirnya sebelum memutuskan untuk bertindak dalam menanggapi konflik.

**e. Pelayanan Masyarakat**

Secara tidak langsung SFCG turut melakukan pelayanan kepada masyarakat berbentuk pembinaan maupun layanan sosial atas kerja sama yang dibangun dengan Kemenag RI. Melalui modul tersebut, SFCG dapat membina secara intensif kepada 131 pemuda dari seluruh Indonesia yang terindikasi berhubungan dengan organisasi ekstrimis di lingkungannya. Dari 131 pemuda yang berasal dari 13 SMA dan 14 Universitas tersebut beberapa diantaranya berasal dari Poso dan Palu, Sulawesi Tengah. Hal ini berarti SFCG melakukan

pelayanan sosial untuk mencegah anak-anak muda tersebut terjerumus ke dalam gerakan ekstrimis yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

#### **f. Evaluasi dan Pengawasan**

SFCG melakukan evaluasi terhadap kerja sama dengan Kemenag dalam misi *peacebuilding* di Poso. Dari evaluasi tersebut ditemukan beberapa pengalaman dan pelajaran, salah satunya adalah pengunduran pelaksanaan program kegiatan yang terjadi akibat perubahan struktur organisasi dalam lembaga pemerintahan ini. Perubahan struktur organisasi tersebut menyebabkan perjanjian kerja sama menjadi tidak relevan sehingga SFCG harus menunggu hingga struktur organisasi yang baru diresmikan di Kemenag. Solusi yang dicantumkan dalam evaluasi tersebut adalah, SFCG akan lebih mengkaji kerja sama serupa hingga kemungkinan-kemungkinan terkecil agar tidak terjadi kendala serupa yang mengakibatkan pergeseran tanggal pelaksanaan hingga enam bulan lamanya (Search for Common Ground, 2015, pp. 23-24).

### **3.3.8. Eksternal: Perempuan**

#### **a. Melaksanakan Advokasi, Analisis, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

SFCG yang bekerjasama dengan Mosintuwu Institut sebagai salah satu sekolah perempuan lokal melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat yang lebih luas akan pentingnya perdamaian bagi kaum perempuan dan anak-anak. Advokasi dilaksanakan kepada 450 perempuan korban konflik Poso dalam sebuah kongres perempuan terbesar pasca konflik pada tanggal 25-27 Maret 2014. Kegiatan ini membahas dua topik utama yaitu Sejarah Perempuan Indonesia dan Poso, dan Undang-Undang Desa.

Dalam dua hari kongres diharapkan mampu meningkatkan kesadaran paling tidak bagi 450 perempuan korban konflik untuk terus memperjuangkan haknya dan berkontribusi dalam perdamaian Sulawesi Tengah melalui sembilan aspek yaitu 1) Agama, Toleransi dan Perdamaian, 2) Gender, 3) Perempuan dan Budaya Poso, 4) Kesehatan Seksual dan Hak Reproduksi, 5) Perempuan dan Politik, 6) Keterampilan Berbicara dan Bernalar, 7) Hak Layanan Masyarakat, 8) Hak Ekonomi, Sosial, budaya dan politik, 9) Ekonomi Komunitas ([www.mosintuwu.com](http://www.mosintuwu.com), 2017).

#### **b. Melaksanakan Fungsi Perantara**

Pada kegiatan yang bekerjasama dengan perempuan ini SFCG menjalankan fungsi perantara sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bernegosiasi. Terdapat berbagai kepentingan yang berbeda dari 450 peserta yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian untuk masa yang akan datang. Meski terjadi adu pendapat, saling sanggah, kritik dan saran namun kegiatan tetap berjalan dengan lancar karena adanya peran SFCG dan Mosintuwu Institut sebagai moderator sekaligus perantara diantara kubu-kubu

tersebut untuk memperjelas maksud dan tujuan dari masing-masing pendapat ketika dirasa sulit untuk dipahami. Hasilnya, 135 rekomendasi kebijakan yang diciptakan benar-benar atas aspirasi 450 peserta dari berbagai latar belakang atas pemahaman dan penghayatan yang mereka miliki sebagai korban konflik (www.sejuk.org, 2014).

### **c. Melaksanakan Fungsi Resolusi Konflik**

SFCG turut menjadi mediator maupun fasilitator dalam Kongres Perempuan Mosintuwu yang bekerjasama dengan kaum perempuan korban konflik Poso pada tahun 2014 ini. Sebagai mediator, SFCG melakukan tugasnya dengan cara menengahi setiap perundingan yang ditujukan bagi dua pihak yang pernah berseteru pada konflik 1998-2001 dan memperjelas maksud dan tujuan masing-masing pihak apabila dirasa mulai sulit untuk dipahami.

Sebagai fasilitator, SFCG bersama Mosintuwu Institut memfasilitasi pertemuan ini hingga menjadi kongres perempuan terbesar pasca konflik yang memungkinkan 450 perempuan saling tukar pikiran dan gagasan, saling memaafkan dan menjalin pertemanan, hingga menyusun agenda perdamaian di masa yang akan datang berdasar peran perempuan yang selama ini tidak dihiraukan di Sulawesi Tengah. Padahal perempuan memegang peran penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat seperti politik, agama, sosial, hingga ekonomi. Oleh sebab itu SFCG bersama Lian Gogali dari Mosintuwu

Institut membantu para perempuan untuk melakukan *physical healing* guna mengembalikan kepercayaan diri masing-masing dan membangun Kabupaten Poso melalui Undang-Undang Desa yang akan mereka terapkan.

Selain itu, SFCG juga turut memfasilitasi pertemuan antara peserta kongres perempuan ini dengan mengundang pejabat-pejabat pemerintahan seperti Komnas Perempuan yang diwakili oleh Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Andy Yentriyani dan Soraya Ramli karena memiliki kedekatan hubungan di kantor pusat Jakarta<sup>5</sup>.

#### **d. Meningkatkan SDM Poso**

Melalui kerja sama dengan kaum perempuan, SFCG turut berpartisipasi dalam meningkatkan SDM Poso melalui kongres yang pernah dilaksanakan. Kongres tersebut paling tidak dapat meningkatkan 450 SDM Poso melalui pemahaman akan hak-hak perempuan, peran perempuan yang bisa diwujudkan dalam membangun perdamaian, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengembangkan SDM seperti diskusi kelompok agar pemikiran perempuan lebih kritis, ceramah, kunjungan lapangan agar wawasan perempuan lebih luas, permainan, bermain teater, menonton film / diskusi film, membuat film pendek, menyanyi dan menari, debat, dan sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Lian Gogali, 4 Oktober 2017.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Lian Gogali, 4 Oktober 2017.

#### **e. Melakukan Pelayanan Masyarakat**

SFCG bersama Mosintuwu Institut memberikan layanan sosial kepada masyarakat peserta kongres yang tertarik untuk bergabung dengan sekolah perempuan pasca kegiatan berakhir. Layanan sosial tersebut berupa penyampaian informasi dasar seputar organisasi, agenda kegiatan terdekat, dan tujuan yang diharapkan dengan berdirinya sekolah perempuan tersebut bagi perempuan, anak-anak dan keluarga di masa yang akan datang.

Selain itu, seluruh rangkaian kongres yang diselenggarakan selama 2 hari juga sebagai bentuk layanan kemanusiaan yang diberikan oleh SFCG dan Mosintuwu Institut dalam memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan korban konflik Poso untuk bangkit dan membangun perdamaian mulai dari lingkup sekitarnya, yaitu keluarga dan desa. Dengan demikian, SFCG turut menunjukkan kepeduliannya terhadap hak asasi manusia dan keadilan bagi perempuan dan anak-anak korban konflik.

#### **f. Evaluasi dan Pengawasan**

Selama menjalankan kerja sama dengan kaum perempuan di Poso dan sekitarnya, SFCG melaksanakan evaluasi dan juga pengawasan. Dalam evaluasi tersebut SFCG bersama Mosintuwu Institut menemukan kendala dalam menyebarkan hasil kongres kepada setiap peserta kongres. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hasil kongres yang meliputi 135

rekomendasi kebijakan mengenai UU Desa akan disebarkan kepada seluruh peserta untuk menjadi bahan pembelajaran lebih lanjut. Namun tidak semua dari mereka memiliki alamat email ataupun sosial media sejenisnya karena mayoritas dari mereka hanya berpendidikan hingga jenjang SMP atau SMA yang masih buta teknologi. Penyebaran materi pun dilakukan secara manual dengan menunjuk satu perwakilan dari tiap daerah peserta tersebut berasal. Hal ini tentu memakan waktu yang cukup lama dan kurang efisien, namun penyebaran dengan metode seperti itu adalah hal yang paling memungkinkan saat itu<sup>7</sup>.

Pengawasan dilakukan selama proses penyebaran materi, SFCG bersama Mosintuwu Institut memastikan penyebaran materi sampai tangan yang tepat. Selama kurang lebih dalam satu bulan materi tersebut dapat tersalurkan sekitar 90% pesertanya. Hal ini terjadi karena memang para peserta kongres memiliki antusiasme yang tinggi terhadap kepemimpinan kaum perempuan di Sulawesi Tengah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara Lian Gogali, 4 Oktober 2017.

<sup>8</sup> Wawancara Lian Gogali, 4 Oktober 2017.



### **3.3.9. Eksternal: Lembaga Adat/Keagamaan**

#### **a. Melaksanakan Advokasi, Analisis, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat.**

SFCG melakukan advokasi dan upaya peningkatan kesadaran kepada masyarakat melalui produksi video dokumenter yang melibatkan jamaah GKST dan masyarakat Muslim Tentena. Video tersebut menyoroti peran keluarga Bakri yang menjadi penghubung antara Islam dan Kristen yang pernah berkonflik pada tahun 1998-2001 hingga perdamaian mulai dari sini. Potret kehidupan keluarga Bakri dijadikan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Poso bahwa meskipun pernah berkonflik, perdamaian masih bisa diwujudkan dengan toleransi keagamaan.

Video tersebut juga diputar di berbagai kesempatan seperti pelatihan *Student Initiatives on Peacebuilding* yang otomatis akan diputar juga di lembaga-lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan SFCG, hingga pelatihan-pelatihan atau *workshop* yang dilaksanakan seperti pada perayaan festival perdamaian *Peace 360* di Poso dan Palu. Dengan upaya demikian maka akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi yang bisa diwujudkan dengan berbagai jalan, salah satunya seperti yang digambarkan pada film dokumenter Masjid di Kampung Salib.

### **b. Melaksanakan Fungsi Perantaraan**

SFCG melalui kerja sama ini tidak melaksanakan fungsi perantaraan, karena bentuk kerja sama SFCG dengan lembaga adat/agama ini hanya berbentuk produksi film berdasarkan realita kehidupan masyarakat Islam dan Kristen yang menemukan perdamaianya kembali pasca konflik di Tentena.

### **c. Melaksanakan Fungsi Resolusi Konflik**

SFCG bersama lembaga adat/agama berupaya menjadi mediator dan fasilitator yang bagi masyarakat dalam mewujudkan perdamaian di Poso pasca konflik, terlebih bagi kaum perempuan dan anak-anak yang sudah cukup banyak menanggung kerugian akibat konflik. Dalam kerja sama pembuatan film dokumenter yang melibatkan GKST dan masyarakat Muslim minoritas di Tentena, SFCG memfasilitasi segala kebutuhan *shooting* seperti perlengkapan kamera, perekam suara, laptop, hingga SDM yang mengedit video-video tersebut hingga menjadi bentuk film yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dengan adanya fasilitas dari SFCG untuk keperluan pengambilan gambar, masyarakat bisa lebih memahami arti penting toleransi berdasarkan kisah nyata di lingkungannya. Hal ini dapat mendorong masyarakat lainnya untuk memulai perdamaian dari diri sendiri seperti apa yang dilakukan oleh keluarga Bakri.

#### **d. Meningkatkan SDM Poso**

SFCG turut berperan dalam meningkatkan SDM Poso melalui video dokumenter yang telah diproduksi. Melalui dokumenter tersebut dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang arti penting toleransi dan dampaknya kepada kehidupan berbangsa dan beragama. Selama pelaksanaan kegiatan di Poso, paling tidak video ini sudah membantu meningkatkan 603 SDM Poso yang terdiri dari 12 guru agama dan 416 murid-muridnya, serta 175 peserta festival perdamaian *Peace 360* Sulawesi Tengah yang mendapatkan agenda untuk menonton dokumenter ini.

#### **e. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat**

Film dokumenter yang diproduksi atas kerja sama dengan lembaga adat/agama Sulawesi Tengah adalah bentuk layanan sosial/kemanusiaan yang dapat diberikan melalui bentuk visual yang lebih mudah diingat daripada teori/ceramah keagamaan. Dengan ditayangkannya film tersebut dapat lebih mendorong masyarakat untuk menjunjung nilai-nilai toleransi sehingga menghindarkan Poso dari konflik di masa yang akan datang dan menghindarkan lebih banyak perempuan dan anak-anak menjadi korban konflik selanjutnya.

#### **f. Evaluasi dan Pengawasan**

SFCG yang bekerjasama dengan lembaga adat/agama melakukan evaluasi atas produksi video dokumenter berjudul Masjid di Kampung Salib. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tokoh adat/agama di Poso mendukung langkah SFCG untuk merubah stigma masyarakat dalam menyikapi perempuan korban konflik. Masih banyak dari mereka beranggapan bahwa budaya adalah sesuatu yang harus dilestarikan agar tetap abadi. Dengan merubah stigma masyarakat melalui dokumenter tersebut dianggap akan menghilangkan kesucian Poso dari aib atau musibah yang masih dipercaya. Sehingga SFCG hanya memutuskan untuk bekerjasama dengan lembaga keagamaan yang sudah lebih terbuka berkaitan dengan isu-isu HAM seperti PCNU dan GKST Poso.

Pengawasan tidak dilakukan karena dokumenter tersebut tidak menjadi agenda utama dalam program SFCG, melainkan hanya selingan untuk memahami perdamaian yang dapat diwujudkan melalui bentuk termudah dalam aspek kehidupan manusia, yaitu toleransi.

### **3.3.10. Eksternal: Lembaga Pendidikan**

#### **a. Melaksanakan Advokasi, Analisis, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

SFCG melakukan fungsi advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar akan bahaya gerakan ekstrimis dan kepemimpinan yang berakhlak. Advokasi dilakukan dengan adanya presentasi program kegiatan *Student Initiatives on Peacebuilding* di beberapa sekolah di Sulawesi Tengah. Dalam presentasi tersebut SFCG menekankan bahwa program *Student Initiatives on Peacebuilding* disusun berdasarkan adanya keresahan masyarakat Poso akan bahaya gerakan ekstrimis yang sedang terjadi di daerahnya. Dalam hal ini SFCG juga melakukan perlindungan kepada anak-anak muda untuk terhindar dari rekrutmen gerakan ekstrimis melalui lembaga pendidikan formal yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan keyakinan agar dapat terhindar dari ancaman kelompok ekstrimis di kemudian hari.

Dengan diterimanya SFCG di enam lembaga pendidikan Sulawesi Tengah, berarti SFCG sudah melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kepala sekolah atau dosen yang menerimanya yang kemudian seluruh program akan diberikan kepada siswa/mahasiswa bimbingannya.

#### **b. Melaksanakan Fungsi Perantaraan**

Dalam kerja sama ini SFCG tidak melaksanakan fungsi perantaraan karena SFCG tidak hadir di dua pihak yang sedang bernegosiasi atau menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. SFCG datang ke lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk membangun perdamaian melalui kesadaran masyarakat akan gerakan esktrimis yang berbahaya.

#### **c. Melaksanakan Fungsi Resolusi Konflik**

Melalui kerja sama ini SFCG turut melaksanakan fungsi resolusi konflik sebagai fasilitator yang menanggapi isu terorisme atau gerakan ekstrimis di Poso. Melalui program *Student Inniatives on Peacebuilding* misalnya, SFCG berperan sebagai fasilitator untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang didahului dengan adanya pelatihan kepada guru/dosen agama untuk menyampaikan materi sesuai modul yang telah disusun dengan Kemenag sebelumnya. Seluruh kebutuhan pelatihan dipenuhi oleh SFCG termasuk materi, akomodasi, transportasi dan konsumsi kepada seluruh peserta.

#### **d. Meningkatkan SDM Poso**

Melalui kerja sama ini SFCG turut andil dalam upaya peningkatan SDM masyarakat Poso khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat melalui lembaga pendidikan seperti guru/dosen dan siswa/mahasiwanya. Mereka akan

mendapatkan beberapa materi penunjang yang berkaitan dengan jiwa kepemimpinan dan resolusi konflik dalam menyikapi gerakan ekstrimis. Dari kerja sama ini setidaknya melibatkan 428 peserta yang terdiri dari 12 tenaga pengajar dan 416 anak didiknya. Sehingga melalui kerja sama ini setidaknya SFCG meningkatkan 428 SDM Poso melalui modul keagamaan yang berisi tentang kepemimpinan berdasarkan akhlak mulia, komunikasi efektif untuk menolak gerakan ekstrimis, dan *peacebuilding*.

#### **e. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat**

Dari kerja sama ini SFCG turut memberikan pelayanan sosial/kemanusiaan yang berkaitan dengan gerakan ekstrimis yang meresahkan masyarakat. Terlebih bagi 131 siswa/mahasiswa yang terindikasi terlibat dengan organisasi radikal dari 11 kota di seluruh Indonesia termasuk Poso dan sekitarnya. Melalui kerja sama ini, lembaga pendidikan dapat memberikan informasi yang akurat tentang anak-anak didiknya yang terindikasi sehingga dapat membantu menentukan tindakan SFCG kepada anak-anak tersebut dalam memberikan binaan agar kembali ke jalan yang benar. Selain itu, layanan yang diberikan kepada SFCG sangat memudahkan para pemuda yang terindikasi dengan sistem 'menjemput bola', artinya SFCG yang mendatangi anak-anak tersebut untuk melakukan pembinaan dan *physical healing*.

## **f. Evaluasi dan Pengawasan**

SFCG selalu melakukan evaluasi bulanan sekaligus pengawasan untuk memastikan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan di Poso dan Palu dengan mengundang 12 guru/dosen agama ke dalam satu sekolah, kegiatan ini dilaksanakan secara bergilir ke sekolah/universitas lainnya hingga sebanyak enam kali. Hal ini dilakukan karena program ini diberikan kepada anak-anak muda melalui guru/dosen keagamaan di

Selain itu SFCG juga melakukan evaluasi tentang efektivitas program kegiatan kepada para pelajar yang menerima program tersebut dan hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran pada 416 siswa sebanyak 76% akan isu kekerasan ekstrem dan ketidaksetujuan terhadap tindakan ekstrimis sehingga 82% diantaranya akan menghindari kelompok/organisasi yang terindikasi kekerasan ekstrimisme. Selain itu, lebih dari 90% siswa juga menjadi lebih sadar akan pentingnya toleransi antar agama dan kerjasama antar agama untuk mencegah konflik kekerasan di masa yang akan datang.



### 3.4. Analisis Efektivitas Peran *Search for Common Ground* dalam Menangani Kejahatan Kemanusiaan terhadap Perempuan dan Anak-Anak Korban Konflik Poso 2009-2016

Sesuai penjelasan program-program SFCG dalam menangani kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak-anak korban konflik Poso di atas, subbab ini berisi analisa peran SFCG dalam merespon konflik Poso selama tahun 2009-2016 melalui tabel yang disajikan oleh Penulis agar pembaca dapat lebih mudah dalam memahami efektifitas peran INGO tersebut berdasarkan indikator-indikator efektifitas yang sudah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya. Berikut adalah analisa efektifitas peran SFCG berdasarkan indikator Nelson:

**Tabel 3.1**  
**Analisa Efektivitas Peran Internal SFCG berdasarkan Indikator Nelson**

Indikator		Program				
		Komik Perjalanan Mencari Sahabat	Leading Fellowship Program	Peace Leaders Camp: Collaborati on in Diversity	<i>Student Innitatives on Peacebuilding</i>	Festival Perdamaian Peace 361
Advokasi, analisis, dan peningkatan kesadaran masyarakat	Advokasi					
	Analisis		X	X	X	X
	Kesadaran					
Perantaraan		X	X	X	X	X
Resolusi konflik						
Peningkatan SDM Poso						
Pelayanan Masyarakat						X
Evaluasi dan Pengawasan	Evaluasi					X
	Pengawasan	X	X		X	X

**Tabel 3.2**

**Analisa Efektivitas Peran Eksternal SFCG berdasarkan Indikator Nelson**

Indikator		Program				
		Kemenkop olhukam RI	Kemenag RI	Perempuan	Lembaga Adat/Agama	Masyarakat
Advokasi, analisis, dan peningkatan kesadaran masyarakat	Advokasi					
	Analisis	X	X	X	X	X
	Kesadaran	X				
Perantaraan		X	X	X	X	X
Resolusi konflik						
Peningkatan SDM Poso		X				
Pelayanan Masyarakat		X				
Evaluasi dan Pengawasan	Evaluasi	X				
	Pengawasan	X	X		X	

Dari kedua tabel di atas, baik peran SFCG secara internal maupun eksternal dapat dilihat bahwa program SFCG untuk Poso dalam menangani kejahatan kemanusiaan tidak memenuhi semua indikator efektivitas Nelson yang sudah dicantumkan dalam bab sebelumnya. Nelson juga menyatakan bahwa tidak semua organisasi memenuhi keenam indikator efektivitas tersebut, namun sebagian besar dari indikator-indikator tersebut digunakan oleh organisasi internasional yang bergerak di bidang konflik dan perdamaian seperti SFCG. Sedangkan tabel di bawah adalah prosentase efektivitas program internal maupun eksternal SFCG di Poso berdasar indikator di atas:

**Tabel 3.3**

**Prosentase Efektivitas Program Internal SFCG berdasar Indikator Nelson**

Indikator		Program				
		Komik Perjalanan Mencari Sahabat	Leading Fellowship Program	Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity	<i>Student Initiatives on Peacebuilding</i>	Festival Perdamaian: Peace 361
Advokasi, analisis, dan peningkatan kesadaran masyarakat	Advokasi	1	1	1	1	1
	Analisis	1	0	0	0	0
	Kesadaran	1	1	1	1	1
Perantaraan		0	0	0	0	0
Resolusi konflik		1	1	1	1	1
Peningkatan SDM Poso		1	1	1	1	1
Pelayanan Masyarakat		1	1	1	1	0
Evaluasi dan Pengawasan	Evaluasi	1	1	1	1	0
	Pengawasan	0	0	1	0	0
<b>Nilai</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
<b>Baku Mutu</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Prosentase</b>		<b>78%</b>	<b>67%</b>	<b>78%</b>	<b>67%</b>	<b>44%</b>
<b>Keterangan</b>		<b>Efektif</b>	<b>Efektif</b>	<b>Efektif</b>	<b>Efektif</b>	<b>Tidak Efektif</b>
Catatan : -Indikator yang tercapai dianggap bernilai 1. -Indikator yang tidak tercapai dianggap bernilai 0. -Prosentase didapat dari (Nilai/Baku Mutu) x 100%. -Parameter efektivitas: 50% = Efektif, < 50% = Tidak Efektif.						

Sumber: Pengolahan data menggunakan rumus *Mean* berdasarkan indikator Nelson

Dari tabel prosentase efektivitas kelima program internal SFCG di atas, apabila dihitung menggunakan rumus *mean* maka program Komik Perjalanan Mencari Sahabat dan *Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity* menjadi program unggulan dengan nilai 78% yang mampu menjadi alternatif dalam menangani kejahatan kemanusiaan bagi perempuan dan anak-anak korban konflik Poso. Kemudian disusul dengan program *Leading*

*Fellowship Program* dan *Student Initiatives on Peacebuilding* yang menempati urutan kedua dengan prosentase 67%, dan Festival Perdamaian: *Peace 360* yang memiliki tingkat efektivitas terendah dalam upaya membangun kembali perdamaian bagi perempuan dan anak-anak korban konflik Poso.

Sedangkan prosentase program SFCG yang menjalin kerja sama eksternal dengan pihak lain dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Prosentase Efektivitas Program Eksternal SFCG berdasar Indikator Nelson**

Indikator		Program				
		Kemenkop- hukam RI	Kemenag RI	Perempuan	Lembaga Adat/ Agama	Lembaga Pendidikan
Advokasi, analisis, dan peningkatan kesadaran masyarakat	Advokasi	1	1	1	1	1
	Analisis	0	0	0	0	0
	Kesadaran	0	1	1	1	1
Perantaraan		0	0	0	0	0
Resolusi konflik		1	1	1	1	1
Peningkatan SDM Poso		0	1	1	1	1
Pelayanan Masyarakat		0	1	1	1	1
Evaluasi dan Pengawasan	Evaluasi	0	1	1	1	1
	Pengawasan	0	0	1	0	1
<b>Nilai</b>		2	6	7	6	7
<b>Baku Mutu</b>		9	9	9	9	9
<b>Prosentase</b>		22%	67%	78%	67%	78%
<b>Keterangan</b>		Tidak Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif
Catatan : -Indikator yang tercapai dianggap bernilai 1. -Indikator yang tidak tercapai dianggap bernilai 0. -Prosentase didapat dari (Nilai/Baku Mutu) x 100%. -Parameter efektivitas: 50% = Efektif, < 50% = Tidak Efektif.						

Sumber: Pengolahan data menggunakan rumus *Mean* berdasarkan indikator Nelson

Dari tabel prosentase efektivitas program eksternal SFCCG yang diolah menggunakan rumus *mean* di atas, kerja sama dengan kaum Perempuan dan Lembaga Pendidikan dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menangani kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak-anak korban konflik karena memiliki nilai efektivitas sebesar 78%. Sedangkan alternatif lain diduduki oleh kerja sama dengan Kemenag RI dan Lembaga Adat/Agama dengan nilai prosentase sebesar 67%. Kerja sama eksternal dengan Menkopolkam RI dinilai tidak efektif dalam membangun kembali perdamaian bagi perempuan dan anak-anak korban konflik Poso 1998-2001 karena hanya bernilai 22%.

Dari hasil analisa efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa peran SFCCG dalam menangani kejahatan kemanusiaan di Poso terhadap perempuan dan anak-anak korban konflik dinyatakan efektif, karena memenuhi sebagian besar indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Nelson dengan nilai prosentase 50% dari setiap program/kegiatannya baik melalui kegiatan internal SFCCG atau dengan menjalin kerja sama eksternal SFCCG.